



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2021  
(PPAS)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

**Tahun 2020**

## **NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 900 / 189.87 / BPKPD**

**NOMOR : 900 / 1568 / DPRD**

**TANGGAL : 2 NOVEMBER 2020**

**TENTANG**

### **PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Putu Agus Suradnyana, ST**  
Jabatan : Bupati Buleleng  
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng
  
- 2.a. Nama : Gede Supriatna,SH  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Buleleng  
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- b. Nama : I Ketut Susila Umbara, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng  
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- c. Nama : Gede Suradnya  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng  
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- d. Nama : Dra. M. Putri Nareni  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng  
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD

Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

**Singaraja, 2 November 2020**

**BUPATI BULELENG**

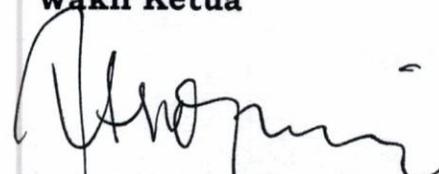
**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BULELENG**

**Selaku  
PIHAK PERTAMA**  
**Putu Agus Suradnyana, ST**

**Selaku  
PIHAK KEDUA**  
**Gede Supriatna, SH**  
**Ketua**

  
**I Ketut Susila Umbara, SH**  
**Wakil Ketua**

  
**Gede Suradnya**  
**Wakil Ketua**

  
**Dra. M. Putri Nareni**  
**Wakil Ketua**

**RINGKASAN  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I. PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021, pada tahap berikutnya dijabarkan kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2021 yang berfungsi sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan dan kegiatan daerah selama satu tahun anggaran. PPAS yang telah disepakati nantinya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan selanjutnya sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam PPAS Tahun Anggaran 2021 dan pemerintah kabupaten mencantumkan:

1. sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2021,

Sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dengan tema Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari *Middle Income Trap*.

## **BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

### **2.1 Rencana Proyeksi/Target Pendapatan Daerah**

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021, merumuskan sasaran ataupun memproyeksikan **Pendapatan Daerah** sebesar Rp2.242.121.629.922.

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2021 dirancang sebesar Rp358.379.886.115

Pajak Daerah pada Tahun 2021 dirancang sebesar Rp145.676.579.840; Retribusi Daerah pada Tahun 2021 dirancang sebesar Rp27.248.782.500; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun 2021 dirancang sebesar Rp19.822.033.435. Lain-lain PAD yang Sah dirancang sebesar Rp165.632.490.339.

#### **2. Pendapatan Transfer**

Target Pendapatan Transfer pada Tahun 2021 dirancang sebesar Rp1.788.254.572.344.

Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2021 dirancang sebesar Rp1.452.836.717.000.

Transfer Antar-Daerah pada Tahun 2021 dirancang sebesar Rp335.417.855.344.

#### **3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dirancang sebesar Rp95.487.171.463,00.

### **2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan**

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021 memproyeksikan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp646.394.460.000.

## **BAB III**

### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Penentuan prioritas didasarkan atas agenda pembangunan dan prioritas urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan memperhatikan potensi daerah, efektivitas, tingkat urgensi serta komitmen dalam penyelesaian masalah utama dan *output* yang telah dicapai tahun 2019 serta tahun berjalan. Pendekatan ini tercermin dari urusan yang peranannya dominan, efektif dan berdampak luas terhadap mencapai sasaran agenda pembangunan di Tahun 2021. Adapun agenda prioritas pembangunan Tahun 2021 mengacu pada RKP Nasional, RKPD Provinsi Bali dan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2021 serta dengan mempertimbangkan potensi daerah, maka agenda prioritas pembangunan daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 mengangkat tema “MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI MELALUI INTEGRASI PERTANIAN DAN PARIWISATA”.

Tema pembangunan tersebut kemudian menjadi muatan nilai dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melandaskan pada nilai-nilai lokal berupa jiwa kedisiplinan, kemandirian, kepedulian dan kebersamaan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
2. Pembangunan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Penguatan Adat dan Budaya Daerah
4. Pengembangan Kawasan Berbasis Potensi Unggulan
5. Pelayanan Dasar dan Penguatan Infrastruktur
6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemenuhan Jaminan Sosial
7. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

## BAB IV

### PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran kinerja yang diharapkan, maka dialokasikan anggaran menurut Urusan pemerintahan maupun organisasi (SKPD), dimana pengalokasiannya berdasarkan atas prioritas urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dan agenda pembangunan tahun 2021. Plafon Anggaran Sementara, oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana fungsi dan urusan, secara kebijakan dijabarkan kedalam program kegiatan pembangunan dengan mencermati tingkat capaian indikator yang paling efektif dan efisien, serta memberi kontribusi besar terhadap pencapaian kinerja sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sasaran kinerja makro pembangunan daerah.

**Tabel 4.2**  
**Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai,**  
**Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,**  
**Belanja Tidak Terduga**  
**Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	929.153.235.170
2	Belanja Barang dan Jasa	713.798.042.703
3	Belanja Hibah	188.499.126.562
4	Belanja Bantuan Sosial	9.134.900.000
5	BELANJA MODAL	786.454.021.687
	Belanja Modal Tanah	15.374.300.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.926.961.717
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	355.665.093.758
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	294.337.016.212
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.650.000
6	Belanja Tidak Terduga	3.067.317.000
7	Belanja Bagi Hasil	17.379.000.000
8	Belanja Bantuan Keuangan	226.030.446.800
	<b>TOTAL</b>	<b>2.873.516.089.922</b>

## **BAB V**

### **RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Struktur APBD di samping menguraikan bagian Pendapatan dan Belanja daerah juga menguraikan tentang Pembiayaan Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Pemerintah Daerah merancang pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 untuk menyeimbangkan antara belanja daerah dan pendapatan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah dioptimalkan untuk penyertaan modal yang menjadi kewajiban daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari sub Penerimaan pembiayaan dan Sub Pengeluaran pembiayaan.

#### **5.1.Sub Penerimaan Pembiayaan**

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah merancang/memproyeksikan Sub Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp646.394.460.000.

#### **5.2.Sub Pengeluaran Pembiayaan**

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 merancang Pembiayaan Daerah dari Sub Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 ini dibuat dan ditanda tangani diatas materai yang cukup untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021.

Singaraja, 2 November 2020

**PIMPINAN DPRD KAB. BULELENG**



**Gede Supriatna, SH**

**BUPATI BULELENG**



**Putu Agus Suradnyana, ST**